

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Review yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu berhubungan dengan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

Saputra *et.al* (2020) Sampel data yang digunakan merupakan hasil dari teknik purposive sampling. Selama penelitian dilaksanakan, metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi logistik dengan penggunaan program SPSS 24. Berdasarkan hasil pengujian oleh peneliti, variabel yang diketahui dapat mempengaruhi audit delay yakni ukuran perusahaan dan umur perusahaan yang bersifat negatif dan secara signifikan. Namun, variabel yang tidak berpengaruh terhadap audit delay yakni opini audit, profitabilitas, dan solvabilitas. Keterbatasan dari penelitian ini diantaranya, pertama penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan data observasi terhadap perusahaan BEI selama 3 tahun yaitu periode 2016 sampai 2018. Kedua, penelitian dilakukan hanya dengan memanfaatkan lima faktor sebagai variabel bebas atau independent yakni ukuran perusahaan audit, umur perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas yang dinilai kurang efektif dalam menganalisis pengaruh terhadap variabel independennya yaitu audit delay. Hal ini dikarenakan masih terdapat faktor-faktor yang belum diteliti sebelumnya. Ketiga, penelitian ini dilaksanakan terbatas pada lingkup perusahaan jasa yang tercatat di BEI. Kelemahan dalam penelitian ini, kurangnya sampel perusahaan mengakibatkan hasil yang kurang menyeluruh dan akurat.

Pratiwi dan Wiratmaja (2018) Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit

delay. Menurut pendapat peneliti, tidak adanya pengaruh terhadap audit delay disebabkan oleh auditor yang baru menerima penugasan untuk pertama kalinya maupun penugasan berulang kali memiliki sikap independen baik dalam profesi maupun mental yang artinya auditor memiliki mental yang bebas dari pengaruh tidak dikendalikan atau tidak dapat diintervensi oleh klien. Selain itu auditor dengan audit tenure pendek sudah mengantisipasi untuk menyelesaikan audit tepat waktu dengan cara menyiapkan perencanaan audit dengan cermat memilih staff-staff senior untuk membantunya dalam menghadapi penugasan pertama dan menambah jumlah auditor. Keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini diantaranya, pertama audit delay dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proaksi yaitu jumlah hari dari tanggal tutup buku 31 desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independent. Kedua, kompleksitas operasi dalam penelitian ini diukur dengan menghitung keseluruhan jumlah anak perusahaan yang dimiliki di mana jumlah anak perusahaan tidak sepenuhnya mampu menggambarkan seberapa tinggi tingkat kompleksitas suatu perusahaan.

Darmawan dan Widhiyani (2017) Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay. Komite audit secara berpengaruh negatif terhadap audit delay. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak ditemukannya pengaruh ukuran perusahaan pada audit delay dalam penelitian ini disebabkan karena semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diawasi oleh investor, pengawas permodalan, pemertintah serta masyarakat, sehingga perusahaan dengan total aset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Disamping itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay karena auditor didalam melaksanakan penugasan audit bersikap profesional dan memenuhi standar audit sebagaimana yang telah diatur oleh IAI tanpa melihat ukuran perusahaan yang diaudit.

Lestari dan Latrini (2018) Menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil

analisis ditemukan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif pada audit delay. Adanya keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel fee audit yang diprosikan dengan professional fee, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjabarkan komponen professional fee dan menggunakan imbalan untuk akuntan publik saja agar dapat memperbaiki penelitian sebelumnya. Keterbatasan penelitian dengan hasil koefisien determinasi yang kecil, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang lebih relevan guna membenahi serta menyempurnakan penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian untuk pengamatan serta dapat melakukan riset dengan menggunakan sektor industri yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Wijasari dan Wijaya (2021) Menggunakan teknik nonprobability sampling. Regresi linier berganda terpilih sebagai teknik dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa audit delay tidak dipengaruhi oleh pergantian auditor, audit delay dipengaruhi secara positif oleh financial distress dan reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay. Keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurangnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi audit delay dengan jangka waktu penelitian yang lebih Panjang untuk melihat efek variabel lainnya pada audit delay. Menurut pendapat peneliti, terdapat perbedaan signifikan audit delay sebelum masa pandemi covid-19 dan saat masa pandemi covid-19.

Dabor dan Mohammed (2015) Kami menggunakan teknik kuadrat terkecil biasa untuk menganalisis data kami. Kami Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, tanggal neraca dan audit delay, sedangkan umur perusahaan dan profitabilitas berhubungan positif dengan audit delay. Pameran ukuran papan hubungan negatif dengan audit delay. Kami menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih tua, tanggal neraca Desember dan Kepemilikan institusional akan meningkatkan keterlambatan penerbitan laporan keuangan yang diaudit akibatnya, studi tersebut merekomendasikan bahwa badan hukum harus membuat undang-undang untuk mengurangi kepemilikan institusi dan perusahaan harus terpaksa menyesuaikan tanggal saldo mereka dari Januari-Desember ke Juni –Juli untuk

menghindari kesibukan terkait Desember. Pentingnya pelaporan keuangan bagi keberadaan perusahaan sangat erat. Belakangan ini kualitas pelaporan keuangan juga menjadi dasar arus investasi lintas negara dengan negara yang dipersepsikan memiliki kualitas pelaporan yang lebih tinggi menerima arus investasi yang signifikan. Konsekuensinya, studi tersebut merekomendasikan badan hukum memberlakukan undang-undang untuk mengurangi kepemilikan institusi Kedua, perusahaan harus menyusun untuk menyesuaikan mereka tanggal keseimbangan dari Januari- [Desember hingga Juni –Juli untuk menghindari kesibukan yang terkait dengan Desember. Ketiga, adanya kebutuhan perusahaan untuk memperkuat sistem tata kelola perusahaan dalam pemantauan proses pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan sangat penting dalam pencapaian dan keberlanjutan kualitas pelaporan keuangan. Ini realisasi telah mengakar dengan baik dalam undang-undang SOX 2002 menyusul pelaporan penyimpangan yang terjadi di Enron dan perusahaan lain di Inggris Raya, meskipun ada kode tata kelola perusahaan di Nigeria yang sebelumnya diamanatkan tahun 2007, tampaknya akan difokuskan pada sektor perbankan dan sektor lain belum terlihat saksi penekanan yang diterima konsep tersebut di sektor perbankan. Oleh karena itu penelitian merekomendasikan bahwa kode tata kelola perusahaan diberikan penerapan yang lebih luas di seluruh perusahaan di berbagai sektor.

Mohammed *et.al* (2018) Menggunakan data dari laporan tahunan dan akun dari perusahaan sampel. Estimasi Generalized Methods of Moment (GMM) digunakan untuk memeriksa efek heterogenitas yang tidak teramati dalam model penundaan audit, sedangkan uji perbedaan nilai R<sup>2</sup> untuk periode pra-dan pasca-adopsi ditentukan menggunakan statistik-Z Cramer. Temuan menunjukkan bahwa keterlambatan laporan audit lebih cepat dengan pemegang saham di komite audit. Studi tersebut membuktikan bahwa merek bernama auditor seperti itu karena Big4 secara signifikan dapat melakukan tugas audit lebih cepat daripada perusahaan non-Big4 dalam rezim IFRS. Pentingnya temuan studi ini menunjukkan inferensi statistik pada peningkatan relevansi nilai berdasarkan adopsi IFRS yang unik di Nigeria. Dengan demikian, regulator harus mempertimbangkan untuk meningkatkan masa jabatan pemegang saham di komite audit agar mereka menjadi lebih akrab dengan pelaporan perusahaan di bawah rezim IFRS.

Lai *et.al* (2020) Kami menggunakan analisis regresi linier, pemodelan audit delay sebagai fungsi dari variabel penjelas berikut: ukuran perusahaan, jenis perusahaan audit, tanda pendapatan, opini audit, dan leverage. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan yang melaporkan laba bersih, yang memiliki opini audit standar, dan yang memiliki ukuran lebih besar mengeluarkan laporan keuangan auditannya lebih awal. Variabel seperti KAP dan leverage tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan audit delay. Menurut pendapat peneliti, Ketepatan waktu adalah karakteristik informasi akuntansi yang penting dan berguna. Dengan demikian, ini sangat menarik bagi badan pengatur yang berbeda dan pembuat standar. Namun ketepatan waktu pelaporan keuangan secara langsung dipengaruhi oleh lamanya audit. Namun, keterbatasan potensial dari penelitian kami terkait dengan ukuran sampel yang kecil, bias pemilihan sampel dan masalah variabel yang dihilangkan (yaitu variabel yang menjelaskan berbagai aspek tata kelola perusahaan, pengaturan kelembagaan, firma audit dan karakteristik teknologi audit). Keterbatasan tersebut juga dapat dijadikan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (PSAK No 1,2015:2).

Menurut Kieso (2011:4), laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang.

Menurut PSAK 1 yang Efektif per 1 Januari 2020, Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d) Laporan arus kas selama periode;
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan
- f) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Entitas diperkenankan menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam Pernyataan ini. Entitas dapat menyajikan komponen laba rugi baik sebagai bagian dari laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah. Jika laporan laba rugi disajikan, maka laporan tersebut merupakan bagian dari komponen laporan keuangan yang lengkap dan disajikan sebelum laporan pendapatan komprehensif.

Beberapa entitas menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan karakteristik utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai:

- a) Faktor dan pengaruh-pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan pengaruhnya, dan kebijakan investasi untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kebijakan dividen;
- b) Sumber pendanaan entitas dan target rasio laibilitas terhadap ekuitas; dan
- c) Sumber daya entitas yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan`SAK.

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan

Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

### **2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal (Kieso 2011:7)

### **2.2.3. Karakteristik Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tahun 2014 adalah:

a) Dapat dipahami

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari kemudahan untuk dipahami oleh pengguna. Dalam hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.

b) Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, maupun masa depan.

c) Keandalan

Informasi dapat dikatakan andal apabila informasi tersebut terbebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan material. Andal berarti informasi tersebut telah menyajikan informasi dengan sebenar- benarnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

d) Dapat dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan.

#### **2.2.4. Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan evaluasi atas prospek dan resiko perusahaan untuk tujuan pengambilan keputusan bisnis. Pengertian Analisis laporan keuangan (*Financial Statement analysis*) menurut K.R Subramanyam (2017:4) adalah penerapan alat dan teknik analitis terhadap laporan keuangan bertujuan umum dan data terkait untuk memperoleh estimasi dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi untuk pengambilan keputusan bisnis sehingga mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Analisis ini tidak mengurangi kebutuhan atas pertimbangan ahli, tetapi justru menyediakan dasar sistematis dan efektif untuk analisis bisnis.

#### **2.2.5. Jenis-Jenis Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Carl S *et.al* (2017:79, 131, 188) ada dua jenis laporan keuangan yang paling umum yaitu:

1) Analisis Laporan Keuangan Horizontal dan Vertikal



Dalam Analisis Horizontal (*horizontal analysis*), jumlah setiap pos keuangan periode berjalan dibandingkan dengan pos yang sama dari laporan keuangan periode sebelumnya. Peningkatan dan penurunan jumlah suatu pos dihitung bersama dengan persentase kenaikan atau penurunannya. Sedangkan dalam Analisis Vertikal, sebuah laporan keuangan setiap pos dinyatakan sebagai persentase terhadap total asset. Setiap pos liabilitas dan ekuitas pemilik dinyatakan sebagai persentase terhadap total liabilitas dan ekuitas pemilik. Dalam analisis vertikal laporan laba rugi, setiap pos dinyatakan sebagai persentase terhadap pendapatan atau pendapatan jasa. Analisis vertikal juga berguna untuk menganalisis perubahan dalam laporan keuangan selama periode tertentu.

## 2) Analisis Laporan Keuangan Modal Kerja dan Rasio Lancar

Modal Kerja (*working capital*) suatu perusahaan adalah selisih antara asset lancar dengan likuiditas lancar. Sedangkan Rasio Lancar (*Current Ratio*) adalah ukuran lain dalam mengekspresikan hubungan antara asset lancar dan liabilitas lancar.

### **2.2.6. Auditing**

#### **2.2.6.1. Definisi Auditing**

Pengertian Auditing menurut Arens *et.al* (2017:2) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Bedasarkan definisi audit tersebut dapat diketahui bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas yang kemudian dievaluasi oleh auditor untuk menetapkan tingkat kesesuaian dan memberikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

#### **2.2.6.2. Jenis-jenis Audit**

Menurut Arens *et, al* dalam buku Auditing dan Jasa Assurance (2017:12-15), terdapat tiga jenis audit yang terdiri dari:

a) Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dan sistem komputer yang baru dipasang. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

Audit operasional dibagi menjadi tiga kategori luas, yaitu: fungsional, organisasi, dan penugasan khusus. Dalam setiap kasus, bagian dari audit mungkin menyangkut pengevaluasian pengendalian internal demi mendapatkan efisiensi dan efektivitas. (Alvin. Arens. *Et.al*: 2017)

- 1) Audit Fungsional adalah sarana untuk mengkategorisasikan aktivitas bisnis seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Fungsi bisa dikategorikan dan dibagi lagi dalam banyak cara yang berbeda. Sebagai contoh: fungsi akuntansi (pengeluaran kas, penerimaan kas, dan pengeluaran gaji), kemudian fungsi penggajian (perekrutan, pencatatan, dan pengeluaran gaji). Audit fungsional berkaitan dengan satu penggajian untuk suatu divisi atau perusahaan secara keseluruhan, audit fungsional memiliki keunggulan seperti mengizinkan spesialisasi oleh auditor. Auditor tertentu dalam staf audit internal dapat mengembangkan keahlian yang tinggi disuatu bidang seperti teknik produksi, mereka dapat bekerja lebih efisien dan efektif karena menghabiskan seluruh waktunya mengaudit bidang tersebut. Kelemahan audit fungsional adalah ketidakmampuan untuk mengevaluasi fungsi – fungsi yang saling berhubungan, sebagai contoh: fungsi teknik produksi berinteraksi dengan fungsi manufaktur dan fungsi lainnya dalam suatu organisasi.
- 2) Audit Organisasi adalah audit operasi suatu organisasi yang berkenaan dengan keseluruhan unit organisasi, seperti departemen cabang, atau anak perusahaan. Audit organisasi menekankan pada seberapa efisien dan efektif fungsi – fungsi

organisasi berinteraksi. Rencana organisasi dan metode untuk mengkoordinasikan aktivitas – aktivitas merupakan hal yang penting bagi jenis audit semacam ini.

- 3) Penugasan Khusus dalam audit operasi, penugasan khusus muncul atas permintaan manajemen atas berbagai jenis audit, seperti menentukan penyebab sistem teknologi informasi yang tidak efektif, menyelidiki kemungkinan dilakukannya kecurangan dalam suatu divisi dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya pembuatan produk.

Alvin A. Arens. *et. al* (2017) menjelaskan ada tiga tahap dalam audit operasional, yaitu:

- 1) Perencanaan: seorang auditor harus menentukan ruang lingkup penugasan dan mengkomunikasikan dengan unit organisasi. Merupakan yang penting juga untuk:
  - a. Menempatkan staf penugasan dengan benar
  - b. Memperoleh informasi latar belakang mengenai unit organisasi
  - c. Memahami pengendalian internal
  - d. Memutuskan bukti yang sesuai yang akan diakumulasikan

Auditor memilih tujuan berdasarkan kriteria yang dikembangkan untuk penugasan, bergantung pada situasi spesifik yang ada. Kedalaman audit operasi sering kali membuat penempatan staf menjadi lebih rumit ketimbang audit keuangan. Audit operasi menuntut auditor menghabiskan lebih banyak waktu dengan pihak terkait untuk menyepakati syarat – syarat penugasan dan kriteria evaluasi.

- 2) Akumulasi dan Evaluasi Bukti: auditor harus mengakumulasikan bukti yang tepat dan cukup untuk memberikan dasar bagi kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji. Jenis – Jenis bukti audit yang dimaksud adalah:
  - a. Pemeriksaan Fisik
  - b. Konfirmasi
  - c. Inspeksi
  - d. Prosedur analitis
  - e. Wawancara dengan klien
  - f. Rekalkulasi

- g. Pelaksanaan ulang
  - h. Observasi
- 3) Pelaporan dan Tindak Lanjut: dalam audit operasi, laporan biasanya hanya dikirimkan kepada manajemen beserta Salinan untuk unit yang sedang diaudit, keragaman audit operasi mengharuskan penyeragaman setiap laporan untuk mengatasi ruang lingkup temuan dan rekomendasi audit. Audit operasi sering kali memerlukan durasi waktu yang signifikan untuk mengkomunikasikan dengan jelas temuan dan rekomendasi audit. Dalam audit kinerja, jika laporan disiapkan mengikuti persyaratan Yellow Book, isi yang spesifik harus dimasukkan, tetapi ada banyak kebebasan yang diperbolehkan perihal bentuk laporan.

b) Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang di audit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bahkan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, Sebagian besar pekerjaan ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu. Bila organisasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yaitu salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Ingin menentukan apakah individu atau organisasi telah menaati persyaratannya, auditor dipekerjakan oleh organisasi yang mengeluarkan persyaratan tersebut.

c) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam menentukan laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya.

Alvin A. Arens. *et.al* (2017) menyebutkan tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk:

- 1) Memperoleh keyakinan layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku, dan
- 2) Melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor.

### **2.2.6.3. Standar Auditing**

Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari 3 standar yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya, yang kemudian dirubah oleh IAPI pada tahun 2013 menjadi 6 standar yang terbagi menjadi 36.

Berikut ini adalah perubahan standar audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2013). Dari 3 standar yang sebelumnya terbagi menjadi 10 sekarang menjadi 6 standar yang terbagi menjadi 36 yaitu:

1. Prinsip-Prinsip Umum Dan Tanggung Jawab
  - a) SA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Suatu Audit Berdasarkan Standar Perikatan Audit”.
  - b) SA 210, “Persetujuan atas Syarat-syarat Perikatan Audit”
  - c) SA 220, “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan”
  - d) SA 230, “Dokumentasi Audit”
  - e) SA 240, “Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”.
  - f) SA 250, “Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Audit Laporan Keuangan”.
  - g) SA 260, “Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola”.
  - h) SA 265, “Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Dan Manajemen”

2. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah Dinilai
  - a) SA 300, “Perencanaan Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”.
  - b) SA 315, “Pengindentifikasian Dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman
  - c) SA 320, “Materialitas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit”.
  - d) SA 330, “Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai”.
  - e) SA 402, “Pertimbangan Audit Terkait Dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa”
  - f) SA 450, “Pengevaluasian Atas Salah Saji Yang Diidentifikasi Selama Audit”.
3. Bukti Audit
  - a) SA 500, “Bukti Audit”.
  - b) SA 501, “Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan”.
  - c) SA 505, “Konfirmasi Eksternal”.
  - d) SA 510, “Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal”.
  - e) SA 520, “Prosedur Analitis”.
  - f) SA 530, “Sampling Audit”.
  - g) SA 540, “Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, Dan Pengungkapan Yang Bersangkutan”.
  - h) SA 550, “Pihak Berelasi”.
  - i) SA 560, “Peristiwa Kemudian”.
  - j) SA 570, “Kelangsungan Usaha”.
  - k) SA 580, “Representasi Tertulis”
4. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
  - a) SA 600, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)”
  - b) SA 610, “Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal”
  - c) SA 620, “Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor”.
5. Kesimpulan Audit dan Pelaporan
  - a) SA 700, “Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan”.
  - b) SA 705, “Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen”.
  - c) SA 706, “Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen”.

- d) SA 710, “Informasi Komparatif – Angka Korespondensi Dan Laporan Keuangan Komparatif”.
- e) SA 720, “Tanggung Jawab Auditor Atas Informasi Lain Dalam Dokumen Yang Berisi Laporan Keuangan Auditan”.
- 6. Area-Area Khusus
  - a) SA 800, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusus”.
  - b) SA 805, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Unsur, Akun, Atau Pos Spesifik Dalam Suatu Laporan Keuangan”.
  - c) SA 810, “Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan.

#### **2.2.6.4. Audit Tenure**

Audit Tenure adalah jangka waktu perikatan yang dilaksanakan antara auditor dari suatu KAP dengan klien. Dalam menentukan dan mengembangkan kriteria audit, hubungan yang terjalin antara auditor dengan auditee memang cukup penting. Namun jika seorang auditor sudah cukup lama menjalin perikatan dengan sebuah perusahaan, auditor tersebut juga harus mempertimbangkan pengaruh negatifnya.

Independensi auditor semakin lama akan semakin hilang jika auditor terlibat hubungan pribadi dengan klien, dan hal tersebut dapat mempengaruhi opini yang nanti akan dikeluarkan. Independensi merupakan salah satu syarat utama bagi seorang auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas jasa audit serta dalam menyatakan opini atas suatu laporan keuangan perusahaan

Indikator audit tenure dapat diukur dengan dengan 3 indikator yaitu:

- 1) Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan perikatan audit dengan klien.
- 2) Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan pergantian audit dengan klien.
- 3) Lamanya Akuntan Publik Atau Auditor memiliki kedekatan emosional.

#### **2.2.6.5. Opini Audit**

Opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan audit, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2013:19).

Pendapat atau opini audit dalam laporan auditor independent merupakan pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Tingkat kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dinilai oleh auditor akan menentukan opini audit yang diterbitkan dalam laporan auditor. Auditor memiliki hak untuk menyatakan opini maupun tidak menyatakan opini mengenai laporan keuangan perusahaan. Pernyataan opini audit yang dikemukakan oleh auditor harus berdasarkan standar audit, temuan, dan hasil audit selama penugasan audit yang dilakukan (IAPI SA 700, 2013:7).

Bentuk opini ada 2 jenis yaitu, opini tanpa modifikasian dan opini modifikasian (SA 705):

### **1. Opini Tanpa Modifikasian**

Laporan auditor yang tanpa modifikasi atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi keaungan (PSAK) dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan Bahasa penjelasan (Halim 2015:77).

Menurut Tuanakotta (2013:519-520) ketika memberikan pendapat yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian wajar, pendapat auditor harus, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan, menggunakan frasa yang dipandang ekuivalen dengan:

- a) Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.
- b) Laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau Ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka kepatuhan, pendapat auditor harus menyatakan laporan keuangan dibuat, dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.



## **2. Opini Modifikasi**

Terdapat 3 jenis modifikasi opini yakni opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan opini tidak menyatakan pendapat.

### **1) Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

1. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak perpasif terhadap laporan keuangan atau
2. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasive.

### **2) Opini Tidak Wajar**

Auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

### **3) Opini Tidak Menyatakan Pendapat**

- 1) Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada, dapat bersifat material dan pevasif.
- 2) Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor, menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interasi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan

kemungkinan dampak kumulatif dan ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

### **2.2.7. Ukuran Perusahaan**

Menurut Riyanto (2014:343) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aktiva. Besar atau kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total harta (assets) yang dimiliki oleh perusahaan dan dari jumlah penjualan (sales). Perusahaan dengan total aset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Selain itu, auditor juga menganggap bahwa dalam proses pengauditan berapapun jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama, sesuai dengan prosedur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Menurut Bursa Efek Indonesia dalam Panduan Go Public (2015) untuk meningkatkan modal yang ditanam, pasar modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam hal pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan biasanya akan mengikuti kegiatan pasar modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal, dengan begitu pasar modal akan menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan atau pemerintah. Menurut SAK (2017) ukuran perusahaan dapat menunjukkan besarnya perusahaan dinilai dari total aset yang dimiliki

### **Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal (1), Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud yaitu:

- 1) Perusahaan dengan Aset Skala Kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:

- a) memiliki total aset tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  - b) bukan merupakan Afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah; dan
  - c) bukan merupakan Reksa Dana.
- 2) Perusahaan dengan Aset Skala Menengah adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
- a) memiliki total aset lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
  - b) bukan merupakan Afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah; dan
  - c) bukan merupakan Reksa Dana.
- 3) Penawaran Umum oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil adalah Penawaran Umum sehubungan dengan Efek yang ditawarkan oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil, dimana nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 4) Penawaran Umum oleh Perusahaan dengan Aset Skala Menengah adalah Penawaran Umum sehubungan dengan Efek yang ditawarkan oleh Perusahaan dengan Aset Skala Menengah, dimana nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Indikator yang digunakan untuk mengetahui ukuran perusahaan suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah total aset. Alasan pemilihan total aset yaitu:

- 1) Total aset lebih menggambarkan ukuran perusahaan dibandingkan pendapatan. Total aset memperlihatkan kekayaan yang dikelola perusahaan sejak pertama kali didirikan, sedangkan pendapatan hanya merupakan hasil yang didapatkan oleh perusahaan dalam satu periode.

#### **2.2.8. Audit Delay**

Menurut Saemargani dan Mustikawati (2015) menyebutkan bahwa audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan audit independen.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian proses audit diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai diselesaikannya laporan audit oleh auditor. Waktu penyelesaian dapat diukur dari jumlah hari. Jumlah hari tersebut dapat dihitung dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan dikurangi tanggal penerbitan laporan audit.

Audit delay dapat didefinisikan sebagai rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/pjok.04/2016 (Pasal 19: 1 – 3 tahun 2016 ) dijelaskan bahwa ketika perusahaan – perusahaan tersebut terlambat atau tidak sesuai dalam menyampaikan laporan keuangannya, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut berupa:
  - a) Peringatan tertulis
  - b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
  - c) Pembatasan kegiatan usaha
  - d) Pembekuan kegiatan usaha
  - e) Pencabutan izin usaha
  - f) Pembatalan persetujuan
  - g) Pembatalan pendaftaran
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi administrative berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau bersama – sama dengan pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g.

Dalam peraturan paling baru yang dikeluarkan oleh OJK (Otorisasi Jasa Keuangan), yaitu peraturan No 44 /POJK.04/2016 tentang laporan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dalam peraturan tersebut menyebutkan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku (OJK, 2016).

Menurut Carmelia Putri dalam Malinda (2015:16) membagi kriteria keterlambatan atau lag menjadi tiga, yaitu:

1. Preliminary lag. Adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. Auditor's signature lag. Adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor. Dari definisi tersebut Auditor's signature lag merupakan salah satu nama lain dari keterlambatan audit.
3. Total lag. Adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Audit Tenure Terhadap Audit Delay**

Audit Tenure adalah lamanya waktu perikatan antara auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Menurut Wulandari & Wiratmaja (2017) dan Diastiningsih & Tenaya (2017) menemukan adanya pengaruh positif antara Audit Tenure terhadap Audit Delay. Adanya pengaruh positif audit tenure pada audit report lag di perusahaan manufaktur karena terkait dengan faktor independensi auditor yang bisa berkurang karena semakin lamanya perikatan dengan klien, dimana dapat menciptakan kedekatan pribadi antara auditor dengan klien dimana terbuka peluang bagi KAP untuk mengulur waktu penyelesaian audit

### **2.3.2. Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay**

Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit terdiri dari: pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Menurut Amani & Waluyo (2016) dan Aryaningsih & Budiarta (2014) mengatakan bahwa Opini Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay, karena ketika perusahaan mendapatkan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian maka auditor akan mencari bukti-bukti penyebab dikeluarkannya opini selain Wajar Tanpa Pengecualian.

### **2.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay**

Ukuran Perusahaan merupakan besarnya cakupan atau luas perusahaan tersebut dalam menjalankan operasinya (Darmawan & Widhiyani, 2017). Manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit delay, dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dari pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik.

Perusahaan berskala kecil juga berpengaruh terhadap terjadinya audit delay tetapi tidak lebih berpengaruh terhadap perusahaan yang berskala besar dikarenakan waktu yang diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan auditing lebih lama. Menurut Amani & Waluyo (2016) menyatakan bahwa Ukuran

Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay, karena besar kecilnya perusahaan berdampak terhadap Audit Delay.

#### 2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hubungan antar variabel dari penelitian ini adalah:

H1: Audit Tenure berpengaruh positif terhadap Audit Delay

H2: Opini Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay

#### 2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Dari variabel-variabel di atas yang dapat memengaruhi Audit Delay akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: Audit Tenure, Opini Audit dan Ukuran Perusahaan. Variabel tersebut dapat dilihat dalam gambar kerangka berfikir berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

